

**ANALISIS PENGARUH RATA – RATA LAMA SEKOLAH, PENDAPATAN
PERKAPITA, PARITAS DAYA BELI, DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN
2015 – 2017**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Tifani Widya Sevinda
No. Mahasiswa : 15313050
Pogram Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2019**

**ANALISIS PENGARUH RATA – RATA LAMA SEKOLAH, PENDAPATAN
PERKAPITA, PARITAS DAYA BELI, DAN INFLASI TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk memenuhi Syarat Ujian Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata I

Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Tifani Widya Sevinda

No. Mahasiswa : 15313050

Pogram Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Penulis,

Tifani/Widya Sevinda

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2017

Nama : Tifani Widya Sevinda
No. Mahasiswa : 15313050
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Heri Sudarsono, SE., M.Ec

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, PENDAPATAN
PERKAPITA, PARITAS DAYA BELI, DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017**

Disusun Oleh : **TIFANI WIDYA SEVINDA**

Nomor Mahasiswa : **15313050**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 7 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Penguji : Nur Feriyanto, Dr., M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala syukur tercurah kepada-Nya sang pemilik rahmat dan hidayah sehingga skripsi ini dapat dipersembahkan.

Skripsi ini khusus dipersembahkan untuk :

1. Bapak Widiyarto dan Ibu Sulistyowati yang selalu mendoakan, memberikan semangat nasehat kepada penulis.
2. Mas Rezha, Bude, Pakde dan Om yang selalu mendoakan penulis dengan tulus dan memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Zhafran Alvaro yang merupakan motivasi tersendiri untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat – sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukung dan memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang pemberi karunia, rahmat dan hidayah. Serta tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan syafaat kepada umat sehingga terlepas dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Rata – Rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2017 ”**.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini dengan baik berkat doa, dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Heri Sudarsono S.E.,M.Ec selaku dosen pembimbing skripsi yang sabar, penuh perhatian dan tidak bosan memberi bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Bapak Anjar yang selalu sabar memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan akademik.
4. Mamah dan Papahku tercinta yang selalu memberikan semangat, nasehat, motivasi dan doa hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Kakak, Bude, Pakde dan Om yang selalu mendoakan dengan tulus agar penulis selalu diberi kemudahan.
6. Sahabat – sahabat Nisa, Vera, Lia, Nedhia, Dinda, Rizka Norma, Febi, Astri, Dinda dan seluruh angkatan Ilmu Ekonomi 2015 yang selalu

menyemangati dan memberikan saran dan bantuan hingga terselesaikan skripsi ini.

7. Teman – teman kos Mbak Oca, Mbak Nindi, Mbak Rema, Mbak Ines, dan Mbak Nora yang selalu memberikan semangat dan bantuan hingga skripsi ini selesai.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembaca dan pihak yang membutuhkan khususnya pemerintah terkait dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 5 Desember 2019

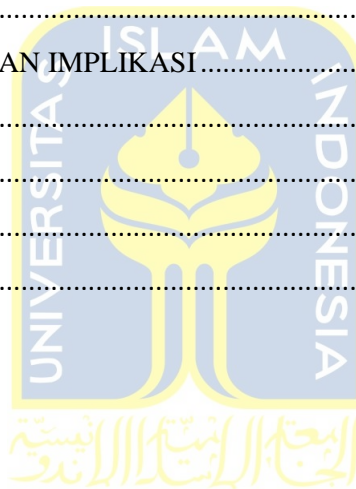
Penulis,

Tifani Widya Sevinda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	28
2.4 Kerangka Pemikiran	31
2.5 Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	33
3.2 Definisi Operasional Variabel	34
3.3 Metode Analisis.....	37

3.4	Estimasi Regresi Data Panel	38
3.5	Penentuan Metode Estimasi	40
3.6	Uji Hipotesis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Deskriptif Data	43
4.2	Pemilihan Model.....	43
4.3	Model Regresi Panel <i>Fixed Effect</i>	45
4.4	Pengujian Hipotesis	47
4.5	Analisis Kabupaten/Kota	52
4.6	Hasil Analisis.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Implikasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		64



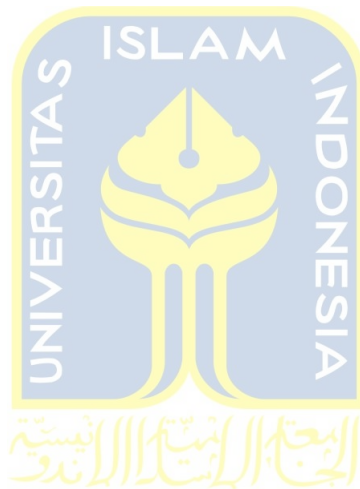
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah 2015-2017.....	3
Tabel 1.2 Presentase Penduduk Miskin di Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017	4
Tabel 1.3 Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1 Hasil Chow Test	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Fixed Effect.....	45
Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi	48
Tabel 4.5 Hasil Uji F	49
Tabel 4.6 Estimasi Pengujian Hipotesis	50



DAFTAR GRAFIK

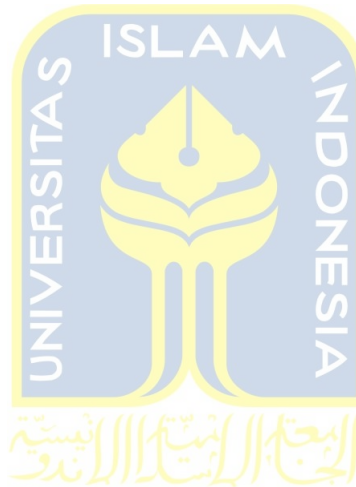
Gambar 4.1 Intercept Kab/Kota DI Jawa Tengah.....	52
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Data Variabel Dependen dan Independen
- II. Hasil *Common Effect*
- III. Hasil *Fixed Effect*
- IV. Hasil *Random Effect*
- V. Hasil Uji Chow
- VI. Hasil Uji Hausman
- VII. Hasil *Intercept*



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam jangka waktu tiga tahun dari tahun 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang di estimasi dengan regresi data panel menggunakan metode *fixed effect* sebagai metode terbaik yang menghasilkan gambaran bahwa Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran berpengaruh tidak signifikan dan negatif, Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan dan negatif, Paritas Daya Beli berpengaruh signifikan dan negative, serta Inflasi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kata kunci : Jumlah Penduduk Miskin, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, Inflasi, *Fixed Effect test*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang berada dibagian tengah pulau jawa, jumlah penduduk Jawa Tengah hingga tahun 2017 berjumlah 34.257.865 jiwa. Dengan rasio jumlah penduduk wanita yaitu 17.269.772 jiwa, dan laki-laki sebesar 16.988.093 jiwa. Dengan jumlah tersebut total angkatan kerja Jawa Tengah yaitu 18.010.612 pada tahun 2017. Mata pencaharian paling besar penduduk Jawa Tengah adalah di sektor pertanian dengan peranan atau sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB pada periode 2017 sebesar 12,59 persen.

kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana individu tidak sanggup menstarakan dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok serta tidak mampu memanfaatkan kekuatan mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi bisa disimpulkan dari uraian di atas bahwa kemiskinan bukan hal baru, kemiskinan sudah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan menjadi masalah pembangunan yang selama ini di hadapi oleh berbagai negara dari masa ke masa. kemiskinan adalah hal umum yang menyangkut masalah ekonomi, agama, sosial, politik, dan paham-paham lainnya. Kemiskinan tidak memandang usia, mulai dari balita, remaja, orang dewasa dan orang tua. Kemiskinan terjadi dimana-mana, di kota, di desa, dan di negara seluruh dunia (Soekanto, 1982: 10).

Pusat perhatian pemerintah seluruh negara atau daerah tertuju pada permasalahan kemiskinan ini, karena kemiskinan merupakan salah satu polemik mendasar yang menjadi prioritas penting untuk sesegera mungkin diselesaikan. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah menjadi salah satu gambaran tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya.

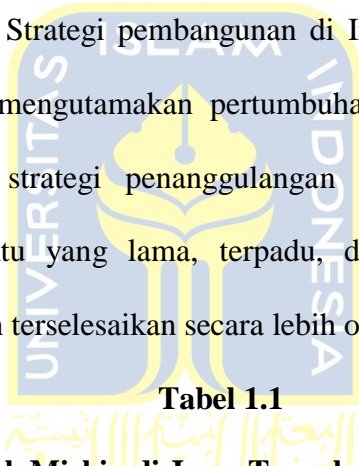
Kebutuhan daerah, serta sasaran pembangunan yang sesuai dalam mengatasi masalah kemiskinan merupakan pola yang saling berkaitan yang mana harus dilakukan secara bersama terutama untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini berarti efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin menjadi bahasan penting dalam pemilihan sektor titik berat pembangunan (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Berbagai kebijakan serta upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan, tetapi jumlah penduduk miskin masih tetap besar. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah selama ini belum maksimal dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Pada awal masa orde baru strategi pembangunan di Indonesia lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka untuk mengatasi persoalan sosial dan politik. Sehingga pemerintah hanya memusatkan pembangunan

di sektor-sektor tertentu yang berpotensi dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu relatif cepat. Akan tetapi, apa yang diharapkan ini tidak berjalan sempurna, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tingkat pengangguran juga masih tinggi, kemiskinan masih tinggi serta terdapat indikasi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar.

Di era sekarang pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah di Indonesia. Tidak seperti Strategi pembangunan di Indonesia pada awal masa orde baru yang mana lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, berpengaruh untuk waktu yang lama, terpadu, dan saling bersinergi sehingga masalah kemiskinan akan terselesaikan secara lebih optimal.



Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah pada Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Persen)
2015	4577	13.58
2016	4506.89	13.27
2017	4450.72	13.01

Sumber : BPS Jawa Tengah 2015-2017

Berdasarkan data tabel dari BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 4577 ribu jiwa, pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 4506.89 dan juga di tahun 2017 masih tetap

mengalami penurunan ke jumlah 4450.72 ribu jiwa. Meskipun demikian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Jawa.

Tabel 1.2

Presentase Penduduk Miskin di Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017

No	Provinsi	Presentase
1	Banten	5.59
2	Jawa Timur	11.20
3	Yogyakarta	12.36
4	Jawa Tengah	12.23
5	Jawa Barat	7.83
6	Dki Jakarta	3.78

Sumber: BPS Jawa Tengah tahu tahun 2017

Tingginya presentase kemiskinan dilihat dari tabel 1.2 sebesar 12.23 tertinggi kedua setelah Yogyakarta. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Jawa menjadi masalah tersendiri bagi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai usaha penyelesaian permasalahan kemiskinan perlu dicarinya jalan keluar yang mana hal ini menjadi tanggung jawab bersama, dan

utamanya bagi pemerintah mengingat tugas pemerintah sebagai tumpuan proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan.

Tabel 1.3

Total PDRB Provinsi Jawa Tengah 2015-2017

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)
2015	806765.09
2016	849313.20
2017	894050.47

Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa PDRB Provinsi Jawa tengah tiap tahunnya mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 806765.09 milyar rupiah meningkat di tahun 2016 menjadi 849313.20, begitu juga di tahun 2017 yang mana menjadi sebesar 894050.47.

Selain kemiskinan ada beberapa indikator lain yang dapat menggambarkan tingkat kemiskinan di suatu daerah, yaitu salah satunya produk domestik regional bruto. PDRB mungkin menjadi gambaran tingkat pembangunan suatu daerah, yaitu apabila PDRB meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Akan tetapi sekalipun PDRB mengalami peningkatan tetap saja permasalahan kemiskinan masih terjadi, hal itu mengindikasikan masih belum sejahteranya masyarakat disuatu daerah. Untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan diseluruh kabupaten/kota maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

1.1 Rumusan Masalah

Salah satu acuan keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dari tingkat kemiskinannya, karena kemiskinan merupakan salah satu cerminan kondisi sosial ekonomi dalam mengindikasikan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Akibat meningkatnya kemiskinan juga menimbulkan banyak masalah-masalah sosial yang bersifat negatif.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya angka kemiskinan antara lain, rata-rata lama sekolah, pendapatan perkapita, paritas daya beli, dan inflasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
3. Bagaimana pengaruh paritas daya beli terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

2. Menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh paritas daya beli terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

1.3 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang penulis ingin sampaikan dalam penelitian kali ini antara lain adalah :

1. Bagi Penulis, teori-teori yang telah diperoleh pada saat kuliah dapat diaplikasikan pada penelitian ini serta bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan dan juga memberi tambahan wawasan bagi pembaca.
2. Pengambil Kebijakan. Harapannya bagi pengambil kebijakan adalah penelitian ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
3. Sebagai bahan acuan penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh beberapa variabel terhadap kemiskinan di beberapa negara dan daerah sebagai bahan pertimbangan pembuatan model ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan dalam bagian ini:

Menurut Teddy (2013) dalam penelitiannya tentang Faktor Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku, dengan periode waktu penelitian dimulai dari tahun 2005 hingga 2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis model data panel, dengan variabel dependennya adalah kemiskinan sedangkan variabel independennya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli/ PPP, Inflasi, TPT, RLS, AMH, APK, APM, AHH, Jumlah Sekolah SMA, dan Jumlah Fasilitas Kesehatan. Dari hasil penelitian ditunjukkan jika kemiskinan pada provinsi Maluku mayoritas merupakan penduduk di Pedesaan. Dari 12 variabel independen yang diuji, 6 (enam) variabel diantaranya signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku antara lain yaitu Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup dan juga Jumlah Sekolah Menengah Atas. Sedangkan faktor yang paling dominan diantara keenam variabel tersebut yaitu Angka Harapan Hidup.

Shinta (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini digunakan model data panel dan diregresi dengan Eviews 9. Dari hasil regresi ditunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0,993546 artinya 99,35 persen variasi jumlah penduduk miskin (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik yaitu TPT, IPM, dan upah minimum. Diketahui bahwa TPT positif dan signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin (Y). Dengan nilai koefisien TPT sebesar 0,073014 yang artinya bahwa setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,073014 persen dan sebaliknya. Pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin (Y) positif dan signifikan. Dengan nilai koefisien upah minimum sebesar 1.33E-06, setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan (Y) sebesar 1.33E-06 juta rupiah dan sebaliknya. Begitu juga IPM terhadap jumlah penduduk miskin (Y) yaitu signifikan negatif, dengan nilai koefisien IPM sebesar -0,865177, setiap peningkatan IPM sebesar 1 persen dapat mengurangi (Y) sebesar 0,865177 persen dan sebaliknya.

Dalam penelitian Fima (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini digunakan model regresi data panel dengan variabel dependennya yaitu Tingkat

kemiskinan (Y), sedangkan variabel independennya adalah Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Pendapatan Domestik Regional Bruto (PnDRB) Perkapita. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Angka Harapan Hidup dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. Angka Melek Huruf tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. Serta secara serentak Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Dalam penelitian Al-hudori (2017) tentang Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2016. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Memiliki hasil bahwa Berdasarkan analisis regresi linear berganda IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin. Dimana jika IPM naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,358. Berdasarkan analisis regresi linear berganda PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dimana jika PDRB naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun

sebesar -0,006. Berdasarkan analisis regresi linear berganda jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,010.

Kumalasari (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan variabel dummy, dengan kurun waktu pengujian dari tahun 2005-2009. Penelitian ini memiliki hasil diantaranya, variabel Angka Harapan Hidup (HH), Pengeluaran Perkapita disesuaikan (PP) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Perkapita disesuaikan dan Jumlah Penduduk akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil regresi variabel dummy wilayah, dimana Kota Semarang yang menjadi *benchmark* menunjukkan bahwa terdapat 17 kabupaten/kota di Jateng yang memiliki perkembangan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan ada 17 kabupaten/kota di Jateng yang memiliki perkembangan tingkat kemiskinan yang sama rendahnya dengan Kota Semarang.

Dalam penelitian Imelia (2012) dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi dengan menggunakan data sekunder dari tahun 1993-2007. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan hasil sebagai berikut. Selama periode 1993-2007 laju inflasi di propinsi Jambi

berfluktuasi rata-ratan 7,42 persen dan tergolong dalam laju inflasi yang rendah (< 10,00 persen). Kecuali pada tahun 1998 laju inflasi di propinsi Jambi tergolong inflasi yang berat yaitu sebesar 72,31 persen. Sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Dalam perekonomian propinsi Jambi selama periode 1993-2007 ternyata variabel laju inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di propinsi Jambi baik terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin maupun terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut Rusdarti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan studi kasus tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, kemudian diperoleh hasil Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 cenderung menurun pada tahun 2007, namun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan perubahannya hal itu ditunjukkan pada kurva yang tidak terlalu mengalami pergeseran. PDRB berpengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar -0,13. Hal ini mendukung teori yang ada yang artinya setiap kenaikan PDRB di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13%. Pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, artinya indikator kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan oleh indikator lain. Hasil temuan ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas

pada pelayanan publik. Perbedaan kota dengan kabupaten berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian fadhilah, sukiman, dewi (2016) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan, dengan studi kasus di Jawa Tengah dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Dengan menggunakan regresi data panel, peneliti ini memperoleh hasil diantaranya variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif sebesar 0,3267 persen, TPT berpengaruh positif sebesar 0,006 persen, IPM berpengaruh negatif sebesar 0,0498 persen, serta dengan koefisien sebesar 0,0009 variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Akan tetapi peneliti menyimpulkan jika variabel pendapatan perkapita adalah yang memiliki koefisien paling besar. Jadi variabel pendapatan perkapita merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah penduduk miskin dibanding dengan variabel lain.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Azami (2009), yaitu penelitiannya yang berjudul Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan terhadap kemiskinan dengan studi kasus di Jawa Timur dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, memiliki hasil dengan kesimpulan variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur selama periode penelitian adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Setelahnya diikuti dengan variabel tenaga kerja dan pendidikan. Variabel yang

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur dari tahun 2001-2007 diantaranya pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta pendidikan. Akan tetapi secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada periode penelitian.

Tabel 2.1

Penelitian-Penelitian Terdahulu

Judul	Metode Penelitian	Hasil
Faktor Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku 2005-2011 (Teddy, 2013)	Regresi Data Panel	Variabel signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku antara lain yaitu Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup dan juga Jumlah Sekolah Menengah Atas. Sedangkan faktor yang paling dominan diantara keenam variabel tersebut yaitu Angka Harapan Hidup.
Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015 (Shinta, 2017)	Regresi Data Panel	TPT positif dan signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin (Y). Pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin (Y) positif dan signifikan, dan juga IPM terhadap jumlah penduduk miskin (Y) yaitu signifikan negatif.
Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto	Regresi Data Panel	Angka Harapan Hidup dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskina, Angka Melek Huruf tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dan

Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013 (Fima, 2013)		Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013.
Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2016 (Al-hudori, 2017)	Regresi Linear Berganda	IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin.
Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2009 (Kumalasari, 2005).	Regresi Data Panel	variabel Angka Harapan Hidup (HH), Pengeluaran Perkapita disesuaikan (PP) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Perkapita disesuaikan dan Jumlah Penduduk akan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 1993-2007 (Imelia, 2012).	Regresi Linear Sederhana	Dalam perekonomian propinsi Jambi selama periode 1993-2007 ternyata variabel laju inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di propinsi Jambi baik terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin maupun terhadap tingkat kemiskinan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan studi kasus tahun 2007 (Rusdarti, 2013).	Regresi Linear Berganda	PDRB berpengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin, dan Pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013 (Fadhilah, Sukiman, Dewi, 2016).	Regresi Data Panel	Variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif, variabel IPM memiliki pengaruh negatif, dan Variabel pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif. Namun dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita memiliki koefisien paling besar, sehingga variabel pendapatan perkapita adalah variabel yang memiliki elastisitas paling besar (yang paling memengaruhi jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tiga variabel

		lainnya).
Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan terhadap kemiskinan : studi kasus provinsi jawa timur tahun 2001-2007 (Azmi, 2009).	Regresi Data Panel	variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Terbukti berturut kemudian variabel pendidikan dan variabel produktivitas tenaga kerja. Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas pekerja dan pendidikan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2001-2007. Namun pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan tidak adanya daya untuk memenuhi standar hidup minimum. Banyak orang menganggap kemiskinan sama dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi nyatanya kedua hal tersebut berbeda. Hal ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan sangat berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari suatu masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan lebih kepada standar hidup relatif dari masyarakat keseluruhan. Kekayaan hanya dimiliki satu orang saja sedangkan kemiskinan sangat tinggi, ini merupakan gambaran ketimpangan yang ekstrim (Kuncoro, 2010).

Di Indonesia pengertian kemiskinan dilandasi oleh 3 kriteria dari institusi yang telah ditetapkan (BPS, 2008) yaitu ;

1. BPS mengatakan, kondisi dimana hidup serba kurang dan minim yang dialami individu atau rumah tangga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal/ yang layak bagi kehidupan seseorang dapat dikategorikan sebagai kemiskinan. konsumsi kalori sebesar 2100 kilo kalori perkapita per hari merupakan pendekatan ukuran kebutuhan minimal. BPS menggunakan data susenas dan juga untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai data kemiskinan.

2. BKKBN, kemiskinan yaitu keluarga miskin prasejahtera, jika termasuk dalam kriteria sebagai berikut : Ibadah agamanya tidak dapat terlaksana, Tidak sanggup makan dua kali sehari untuk seluruh anggota keluarga, Seluruh anggota keluarga tidak ada pilihan pakaian lain di rumah, bekerja atau menuntut ilmu dan bepergian, Lantai rumahnya masih didominasi oleh tanah, Tidak sanggup memeriksakan anggota keluarga ke sarana kesehatan.

3. Bank Dunia menyebutkan, bahwa kemiskinan adalah suatu ketidakcukupan/ kurangnya (*deprivation*) akan aset-aset penting serta peluang-peluang di mana setiap individu berhak mendapatkannya. Dengan penghasilan US\$ 1,00 per kapita per hari mengindikasikan bahwa tidak tercapainya kehidupan yang layak, hal ini yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagai bentuk dari kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada baik di negara berkembang atau maju. Di negara maju, dengan kemiskinan sama, akan tetapi ukuran tingkat pendapatannya berbeda dengan kemiskinan di negara berkembang seperti di Indonesia. Rumitnya penyelesaian masalah kemiskinan untuk mencari kebijakan

yang tepat, karena setiap kebijakan dibuat hanya untuk menyelesaikan kemiskinan sementara.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional serta penyebabnya dapat digolongkan dalam 2 sisi arah yang berbeda yaitu menjadikan kemiskinan hanya semata-mata sebagai aspek ekonomi atau justru sebagai isu sosial. Jika kemiskinan hanya menjadi permasalahan ekonomi maka kurangnya pendapatan per kapita serta tingkat kalori yang dikonsumsi per orang merupakan gambaran kemiskinan. Namun dengan menggunakan pendekatan sosial, kemiskinan diartikan sebagai tidak mempunya seseorang untuk ikut andil dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketrampilan dan tingkat pendidikan yang dapat mengucilkan sosial, akibatnya seseorang merasa memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang tidak baik atau tidak layak.

2.2.1.1 Teori Kemiskinan

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.2.1.1.1 Teori Maxwell School of Syracuse University

Teori *Maxwell school* menyatakan bahwa teori penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori individual dan teori agregat. Teori individual secara rinci menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh individu orang miskin. Beberapa penyebab individual tersebut diantaranya adalah level pendidikan dan keterampilan, kesehatan, *disability* dan usia, orientasi kerja dan budaya kemiskinan, diskriminasi baik gender, ras maupun agamanya. Teori agregat dibedakan menjadi dua yakni *case aggregate poverty theory* dan *generic poverty theory*. *Case theory* menyatakan bahwa kemiskinan memang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti teori individu, namun secara agregat faktor-faktor tersebut juga berpengaruh, dimisalkan adalah tingkat pendidikan agregat, kesehatan agregat, atau budaya keseluruhan dalam suatu masyarakat yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah sehingga kemiskinan eksis di masyarakat tersebut. Sedangkan, *generic theory* menyatakan kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih global seperti : ketersediaan kerja layak yang terbatas, kegagalan pasar, pendapatan nasional yang rendah.

2.2.1.1.2 Teori Phill Bartle dan Theori Philip dan Rayhan

Bartle menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari suatu kejadian atau *shock* yang menyerang suatu individu. Bartle berpendapat bahwa ada kecenderungan orang miskin untuk menggantungkan diri sehingga bertahan dalam kemiskinan. Selain itu, ada juga faktor yang menghalangi seseorang keluar dari kemiskinan seperti level pendidikan, kegagalan pasar, infrastruktur yang kurang baik, serta rendahnya kapital yang menyebabkan kemiskinan semakin berlanjut. Mirip dengan Bartle, Philip dan Rayhan juga mengatakan penyebab kemiskinan diantaranya adalah perang, bencana alam, rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan, serta faktor mentalitas dan budaya sebagai penyebab bertahannya kemiskinan.

2.2.1.1.3 Teori Lingkaran Kemiskinan (*Poverty Cycle*)

Teori lingkaran kemiskinan berkembang sangat umum dengan berbagai versi, secara umum mengatakan suatu kesamaan, yaitu variabel “X” tertentu yang berperan sebagai penyebab kesinambungan kemiskinan. Variabel yang menjadi penyebab (atau determinan) kemiskinan dan akan muncul kembali sebagai akibat (indikator) dari kemiskinan tersebut, sekaligus memulai lagi putaran kemiskinan yang baru terus menerus. Beberapa yang paling umum meletakkan faktor-faktor di bawah ini sebagai determinan (dengan pendekatan individu): Rendahnya pendidikan, Kualitas kesehatan yang buruk, Banyaknya anak adalah investasi bagi orang miskin,

Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya saving (karena pendapatan habis untuk konsumsi).

2.2.2 Ukuran Kemiskinan

Besarnya pengeluaran untuk terpenuhinya kebutuhan dasar minimum pangan dan kebutuhan non pangan atau standar yang mencerminkan batas individu dikatakan miskin jika dilihat dari sisi konsumsi digambarkan dengan garis kemiskinan. Setiap negara menggunakan garis kemiskinan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun garis kemiskinan yang dianggap umum, dikarenakan lokasi yang berbeda serta standar kebutuhan hidup yang berbeda pula di tiap negara.

Badan Pusat Statistik (2010) menetapkan, untuk menghitung garis kemiskinan suatu masyarakat adalah dengan acuan penghasilan tiap individu dibawah Rp 7.057 per hari. Penetapan jumlah Rp 7.057 per orang per hari tersebut diperoleh dengan menghitung garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan pangan serta non pangan. Dalam menetapkan kebutuhan minimum pangan digunakan acuan 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta untuk pengeluaran kebutuhan minimum non pangan mencakup antara lain biaya untuk perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan.

World Bank menggunakan standar kemiskinan didasarkan pada pendapatan per kapita, yaitu penduduk dengan pendapatan per kapita dibawah sepertiga rata-rata

pendapatan per kapita nasional. Sehingga yang dimaksud tersebut adalah bahwa ukuran kemiskinan yaitu USD \$2 per orang per hari menurut *World Bank*.

2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (Pendidikan)

Dalam membangun kualitas sumber daya manusia dibutuhkan program sebagai bentuk investasi jangka panjang, salah satunya yaitu pendidikan. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu target utama untuk pembangunan suatu negara atau daerah. Negara atau daerah akan maju apabila tingkat pendidikannya semakin baik, serta suatu negara atau daerah akan hancur perlahan apabila tingkat pendidikannya semakin buruk.

Sekolah adalah sarana atau media untuk mendapatkan pendidikan dengan tujuan agar taraf hidup semakin baik. Dimana sekolah adalah mereka yang terdaftar serta aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri maupun swasta.

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menjadi dasar perhitungan komponen tingkat pendidikan (Hakim, 2002). Angka melek huruf yaitu seseorang berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca serta menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata waktu yang dihabiskan penduduk 15 tahun keatas untuk

menempuh jenjang pendidikan formal. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang jilankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

2.2.4 Pendapatan Perkapita

Badan Pusat Statistik menjelaskan definisi dari Produk Domestik Regional Bruto yaitu merupakan jumlah nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha disuatu wilayah. Untuk mendapatkan PDRB per kapita itu sendiri dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

Sedangkan menurut (Todaro, 1997), rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya khususnya kebutuhan pokok di suatu daerah digambarkan dengan PDRB per kapita. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan satu indikator kesejahteraan dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek kemampuan pendapatan, tetapi berkaitan juga dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Menurut Robinson Tarigan (2005 : 24), ada tiga pendekatan dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto seperti dikutip dari Rahmad Juniawan

:

1. Pendekatan Produksi

Nilai tambah bruto ataupun nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari unit-unit produksi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu namun biasanya satu tahun. Nilai Tambah Bruto itu sendiri merupakan pengurangan dari seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi terhadap Nilai Produksi Bruto (NPB atau Output).

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB yaitu seluruh balas jasa yang didapat dari faktor-faktor produksi yang turut serta dalam suatu proses produksi disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Dilihat dari definisi tersebut maka Nilai Tambah Bruto yaitu seluruh jumlah upah dan gaji, bunga modal, sewa tanah serta keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan juga pajak langsung lainnya. Termasuk juga didalam pengertian DRB ini yaitu bagian-bagian penyusutan serta pajak tak langsung neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto merupakan keseluruhan pengeluaran yang digunakan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembuatan modal tetap domestik bruto, serta perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah/region pada kurun waktu tertentu, biasanya satu

tahun. Menggunakan metode ini, untuk menghitung Nilai Tambah Bruto dipusatkan pada penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi.

2.2.5 Paritas Daya Beli

Suatu ukuran pendapatan yang disesuaikan dengan paritas daya beli yaitu pengeluaran perkapita riil. Untuk mengukur tingkat kuasa masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi secara luas (daya beli) dapat menggunakan variabel ini. Paritas daya beli merupakan variabel yang penting, dikarenakan derajat kesehatan masyarakat guna meningkatkan usia harapan hidup, juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik dapat dipengaruhi oleh variabel ini. Pengeluaran riil perkapita yang meningkat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang meningkat juga.

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antarwilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah masih belum sebanding, oleh karena itu diperlukanlah standardisasi. Misalkan satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standardisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah menjadi terbanding.

2.2.6 Inflasi

Menurut (suparmono, 2004), inflasi adalah keadaan dimana harga barang-barang dan jasa secara umum serta terus menerus mengalami kenaikan. Yang dimaksud umum yaitu kenaikan harga tersebut bukan hanya terjadi untuk satu jenis barang saja akan tetapi beberapa barang lain juga yang dapat mempengaruhi barang lainnya dipasar. Sedangkan terus menerus artinya kenaikan harga barang tidak dalam waktu singkat dan sesaat .

Berdasarkan jenis-jenisnya, inflasi digolongkan menjadi :

- a. Inflasi Ringan ($< 10\%$ setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relative.
- b. Inflasi Sedang (10% - 30% setahun) ditandai dengan kenaikan harga yang relative cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian
- c. Inflasi Berat (30% - 100% setahun) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.
- d. Hiper Inflasi ($>100\%$ setahun) dimana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang-barang. Harga-harga

naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang.

Sedangkan jika menurut sebabnya, inflasi ibagi menjadi 3 macam :

a. Demand Pull Inflation

Demand Pull Inflation timbul karena permintaan masyarakat terhadap barang yang terlalu kuat. Demand Pull Inflation terjadi karena permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh.

Kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestic bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi.

b. Cost Push Inflation

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada Cost Push Inflation tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi.

c. Mixed Inflation

Gejala kombinasi antara unsur inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Pada umumnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran, yaitu kombinasi dari kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, dan sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

2.3 Hubungan Antar Variabel

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel dependen (Jumlah Penduduk Miskin) dengan variabel independen (Rata-Rata Lama Sekolah, Pendaapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, dan Inflasi), yaitu :

1. Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Simmons menjelaskan (dalam Todaro, 2000) dibanyak negara salah satu cara untuk menghindari dari kemiskinan yaitu dengan pendidikan. Yang mana digambarkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghantarkan individu miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang baik serta penghasilan yang tinggi. Akan tetapi, pendidikan yang tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya.

Pendidikan (formal dan non formal) berperan penting dalam rangka mengurangi kemiskinan jangka panjang. Yang mana secara tidak langsung yaitu dengan cara melalui perbaikan produktivitas dan juga efisiensi secara

umum, sedangkan secara langsung dalam rangka meningkatkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dilakukan dengan cara pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan (Lincoln, 1999). Tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi, juga akan meningkatkan pengetahuan dan keahlian individu yang mana akan meningkatkan produktivitas individu tersebut. Dengan tenaga kerja yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi, tentu perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak, maka yang bersangkutan dapat mendapatkan penawaran upah/gaji yang lebih besar dari perusahaan.

2. Hubungan Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2006). Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara berkembang, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan, semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaya. Oleh sebab itu, pendapatan

perkapita yang tinggi tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah.

3. Hubungan Paritas Daya Beli Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

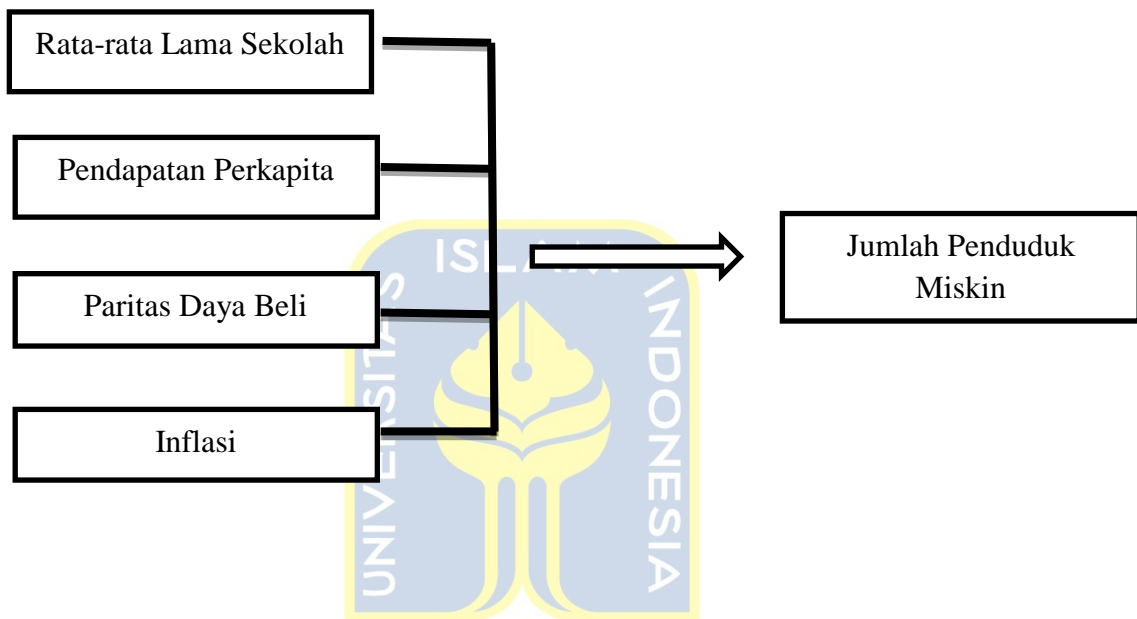
Daya beli adalah kuasa seseorang dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Harga-harga riil antar wilayah sangat mempengaruhi kemampuan ini, sebab daya beli dapat naik atau turun berdasarkan nilai tukar yang digunakan. Maka dari itu kuasa daya beli masyarakat berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah yang berbeda-beda masih belum sebanding, oleh karenanya standarisasi sangat diperlukan. Contohnya satu rupiah di wilayah tertentu mempunyai daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan yang lain akan menjadi sama dan sebanding dengan standarisasi.

4. Hubungan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dan secara terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga barang dan jasa dapat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keadaan hidup masyarakat. Inflasi, pengangguran dan kemiskinan merupakan tiga masalah yang tak kunjung teratasi di negara ini, ketiga hal ini saling berkaitan sebab apabila pemerintah mengatasi inflasi, maka akan berdampak pada

meningkatnya pengangguran, kemudian jika pengangguran meningkat maka akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

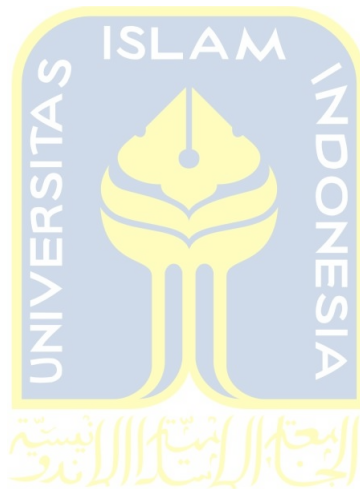


2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017
2. Pendapatan Per Kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017
3. Paritas Daya Beli berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017

4. Inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder didalamnya yang berasal dari berbagai sumber penerbit. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang mana pengumpulannya dilakukan oleh orang lain, data yang diambil diantaranya yaitu : tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, pendapatan perkapita, paritas daya beli, serta inflasi. Data tersebut merupakan data kuantitatif dan juga data kualitatif dari tahun 2015-2017. Tahun tersebut dipilih peneliti karena di tahun 2017 masih dijumpai beberapa desa tertinggal di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta dari berbagai sumber yang mendukung penelitian.

Periode data yang digunakan adalah data periode tahun 2015-2017 untuk masing- masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperlukan adalah:

1. Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2017 sehingga berguna untuk mengetahui perkembangan tahunan (berkaitan dengan penelitian yang dibahas).

2. Data jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2017.
3. Data tingkat kesehatan, seperti angka gizi buruk, orang yang memiliki penyakit, serta angka ibu melahirkan dan meninggal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2017.

3.2 Definisi Oprasional Variabel

Sugiyono 2009 menyebutkan, bahwa variabel penelitian adalah semua hal yang berbentuk apapun yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian akan diperoleh suatu hasil berupa informasi terkait hal tersebut, dan setelah itu diambil kesimpulannya. Demikian tersebut dalam variabel penelitian yaitu merupakan gambaran umum mengenai objek-objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan juga variabel independen (variabel bebas).

3.2.1 Variabel dependen

Jumlah Penduduk Miskin

Rendahnya pendapatan penduduk serta jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadikan ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (dalam persen).

3.2.2 variabel Independen

Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Rata-Rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita Regional Bruto, Paritas Daya Beli, serta Inflasi.

Peneliti menggunakan variabel-variabel diatas guna memperjelas tujuan penelitian, agar diperoleh gambaran terperinci dari masing-masing variabel (kemiskinan, rata-rata lama sekolah, pendapatan perkapita regional bruto, paritas daya beli, dan inflasi) guna mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun sesuai dengan penelitian yang dibahas.

a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata waktu yang dihabiskan penduduk 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang jilankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

b) Pendapatan Perkapita (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau jumlah seluruh nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan disuatu daerah dalam periode tertentu, dalam satuan ribu

rupiah. Dan untuk PDRB perkapita sendiri dapat dihitung melalui PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah.

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Data PDRB yang digunakan adalah PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah 2015-2017.

c) Paritas Daya Beli

Teori ini diperkenalkan oleh ekonom Swedia, Gustav Cassel, pada tahun 1918. “Paritas daya beli (Purchasing Power Parity) merupakan suatu teori keuangan internasional yang terkenal dan kontroversial. Teori ini berupaya untuk melihat hubungan antara inflasi dan nilai tukar secara kuantitatif” (Madura, 2006:299). Teori paritas daya beli ini pada dasarnya adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan, jika suatu negara mengalami suatu ketidakseimbangan neraca pembayaran.

Teori paritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara sehingga daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk asing (Madura, 2006:300).

d) Inflasi

Menurut Boediono (2001) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Dalam prakteknya,

inflasi bisa diamati dengan mengamati gerak dari indeks harga. Tetapi, disini harus diperhatikan ada tidaknya “Suppressed Inflation”. Dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (demand) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian kali ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dalam penelitian kali ini digunakan untuk mengetahui variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau tidak. Kemudian dalam analisis tersebut dilakukan menggunakan metode regresi data panel.

$$MK_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLS + \beta_2 PnDRB + \beta_3 PPP + \beta_4 INFLASI$$

MK = Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

PnDRB = jumlah Pendapatan Perkapita Produk Domestik Regional Bruto (Satuan Rupiah)

PPP = Jumlah Paritas Daya Beli (ribu rupiah)

Inflasi = Jumlah Inflasi (persen)

Menurut Widarjono (2013), dalam menggunakan data panel ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Beberapa keuntungan yang didapat antara

lain data panel dapat memberikan data lebih banyak jadi akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar, mengingat data panel merupakan gabungan dari dua data yaitu data time series dan data cross section. Kemudian masalah yang timbul pada saat penghilangan variabel juga mampu diatasi dengan data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section.

3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam estimasi model analisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu dengan menggunakan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan yang terakhir menggunakan Random Effect Model (Widarjono, 2013).

1. Common Effect Model

Metode pendekatan yang paling sederhana dalam mengestimasi data panel adalah model common effect dimana dengan hanya mengkombinasikan data time series dengan data cross section. Perbedaan waktu dan individu tidak perlu dilihat, kita hanya perlu menggabungkan data yang kita miliki saja, kemudian kita dapat menggunakan OLS untuk mengestimasi data panel. Dimensi antara individu ataupun waktu tidak begitu diperhatikan dalam pendekatan common effect, jadi diasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu perilaku antar kabupaten adalah sama (Widarjono, 2013)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

2. Fixed Effect Model

Diasumsikan terdapat efek yang mempunyai perbedaan antar individu di dalam fixed effect model. Fixed effect model adalah parameter yang tidak diketahui, oleh karena itu selanjutnya akan di estimasi menggunakan variabel dummy. Dalam model fixed effect, untuk mengestimasi data panel yang ingin diteliti maka dapat digunakan variabel dummy sebagai alat untuk mengestimasi. Least Squares Dummy Variables (LSDV) merupakan model estimasi tersebut (Widarjono, 2013). Dengan menggunakan variabel dummy, model fixed effectnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \beta_5 D_{3i} \dots + e_{it}$$

3. Random Effect Model

Diketahui bahwa variabel dummy dalam model fixed effect memiliki tujuan guna mewakili ketidaktahuan kita dengan model yang sebenarnya. Akan tetapi itu akan mempengaruhi konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang berakibat berkurangnya efisiensi parameter. Disisi lain, adanya random effect model dapat mengatasi hal tersebut dengan menggunakan variabel gangguan (error terms). Estimasi data panel akan dilakukan dalam model random effect ini, yang mana variabel gangguan kemungkinan akan saling berkaitan baik antar waktu ataupun antar individu (Widarjono, 2013). Model random effect dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.5 Penentuan Model Estimasi

Pertimbangan statistik perlu dilakukan guna pemilihan model yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Beberapa metode pengujian diperlukan dalam rangka memilih model yang paling tepat, yaitu :

3.5.1 Chow Test (Uji Chow)

Uji chow dilakukan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan adalah model common effect atau model fixed effect. Dalam uji chow menggunakan hipotesis :

HO : Model common effect

H1 : Model fixed effect

Perbandingan antara F-statistik dengan F tabel menjadi dasar penolakan pada hipotesis tersebut. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka menolak hipotesis nol yang berarti model paling tepat untuk digunakan adalah fixed effect, perbandingan tersebutlah yang nantinya digunakan. Begitu juga sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka menerima hipotesis nol dan common effect menjadi model yang paling tepat digunakan.

3.5.2 Uji Hausman

Pemilihan model yang paling tepat untuk digunakan antara model fixed effect atau random effect dilakukan dengan uji hausman. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut :

Ho : Model random effect

H1 : model fixed effect

Pada uji hausman statistik yang digunakan mengikuti distribusi statistic Chi Square dan degree of freedom sebanyak K, dengan K merupakan variabel independen. Model fixed effect akan menjadi paling tepat digunakan apabila Ho ditolak dan statistik hausman juga lebih besar dari nilai kritisnya, sedangkan model random effect dapat dipilih apabila hipotesis nol gagal ditolak serta nilai statistik hausmanya lebih kecil dari nilai kritisnya (Widarjono, 2013).

3.6 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis diantaranya uji koefisien determinasi (Uji R^2), uji koefisien regresi secara serentak (F), dan yang terakhir adalah uji koefisien regresi parsial (Uji T).

3.6.1 Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)

Seberapa jauh suatu model mampu menerangkan variasi variabel terikat diukur dengan koefisien determinasi (R^2). Nilai (R^2) adalah nol dan satu. Kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dikatakan sangat terbatas atau kecil apabila nilai (R^2) makin mendekati nilai nol, dan sebaliknya jika nilai (R^2) semakin mendekati satu maka variabel independen tersebut memberikan alasan atau informasi yang kuat yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2002).

3.6.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F dilakukan guna mengetahui apakah variabel-variabel independen secara serentak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga jika nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka H_0 ditolak, yang artinya variabel-variabel independen tersebut seluruhnya berpengaruh terhadap dependen (Widarjono, 2013).

3.6.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t yaitu untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh dari tiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dengan anggapan yang mana variabel independen lainnya konstan. Berikut merupakan hipotesis uji t-statistik, yaitu :

H_0 : Signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila probabilitas nilai t_{hitung} lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 , begirupun sebaliknya apabila probabilitas t_{hitung} lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ maka H_0 akan ditolak dan menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan pada uji t yaitu pada angka 5% (Widarjono, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh variabel independen yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta dari berbagai sumber yang mendukung penelitian yaitu Rata-rata Lama Sekolah dalam satuan tahun, Pendapatan Perkapita dalam satuan rupiah, Paritas Daya Beli dalam satuan ribu rupiah, dan Inflasi dalam satuan persen, terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan dalam satuan persen jiwa. Dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan studi kasus di Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Sesuai persyaratan yang telah ditentukan maka analisis hasil regresi ini menjelaskan model regresi dan uji untuk memilih model yang terbaik yang mana mampu menjelaskan permasalahan yang ingin dijawab serta sesuai dengan tujuan penelitian.

4.1 Pemilihan Model

4.1.1 Uji Chow

Untuk melihat apakah model yang terbaik yang digunakan untuk estimasi terakhir antara common effect atau fixed effect maka dilakukan uji chow, hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

H0: Model Common Effect terpilih

H1: Model Fixed Effect terpilih

Tabel 4.1
Hasil Uji Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3794.451262	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	795.743793	34	0.0000

Sumber: data diolah dengan e-views 9

Hasil uji chow dengan membandingkan antara *common effect* dan *fixed effect*, yaitu bahwa nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ atau kurang dari lima persen, artinya model signifikan maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

4.1.2 Uji Hausman

Untuk melihat model yang layak digunakan untuk estimasi terakhir antara model Fixed Effect atau Random Effect dilakukan dengan uji hausman. Dalam uji hausman dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut: Ho ditolak dan model *Random Effect* dipilih apabila Chi-squarenya lebih kecil dari alpha 5 persen. Sedangkan model *Fixed Effect* dipilih apabila nilai Chi-squarenya signifikan pada alpha 5 persen maka H1 diterima.

Tabel 4.2
Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.637548	4	0.0470

Sumber: data diolah dengan e-views 9

Hasil yang terdapat di tabel 4.2 menunjukkan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.0470 lebih kecil dari alpha 5 persen ($0.0470 < 0.05$). Hal ini artinya menerima H1 berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect*.

4.2 Model Regresi Panel Fixed Effect

Tabel 4.3

Hasil Uji Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	221.3465	14.53977	15.22352	0.0000
X1	-1.737182	2.052943	-0.846191	0.4005
X2	-0.268158	0.126963	2.112090	0.0385
X3	-0.008693	0.001491	-5.828374	0.0000
X4	0.011856	0.349586	0.033913	0.9730
	Effects Specification			

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999668	Mean dependent var	128.9019
Adjusted R-squared	0.999478	S.D. dependent var	74.45573
S.E. of regression	1.701809	Akaike info criterion	4.179813
Sum squared resid	191.1462	Schwarz criterion	5.165569
Log likelihood	-180.4402	Hannan-Quinn criter.	4.579261
F-statistic	5236.971	Durbin-Watson stat	2.147567
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah dengan e-views 9

$$MK = 221.3465 + -1.737182RLS + -0.268158PnDRB + -0.008693PPP + 0.011856INFLASI + e_{it}$$

Berdasarkan tabel hasil regresi *Fixed Effect Model* diketahui nilai koefisien variabel dependen yaitu jumlah kemiskinan sebesar 221.3465, nilai tersebut berarti variabel independen rata-rata lama sekolah, pendapatan perkapita, paritas daya beli, dan inflasi berpengaruh positif dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Serta dilihat dari koefisien variabel independen sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien Rata-rata Lama Sekolah sebesar -1.737182 berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin, artinya apabila Rata-rata Lama Sekolah naik satu tahun, maka Jumlah Penduduk Miskin akan turun sebesar -1.737182. Jadi semakin tinggi Rata-rata Lama Sekolah maka semakin rendah Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah.

- b. Pendapatan perkapita regional bruto -0.268158 apabila meningkat satu rupiah maka akan berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Sehingga pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan mengurangi Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah.
- c. Nilai koefisien Paritas Daya Beli -0.008693 berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang mana berarti apabila Paritas Daya Beli meningkat seribu rupiah maka Jumlah Penduduk Miskin akan turun sebesar -0.008693. Hal ini menunjukkan bahwa apabila daya beli masyarakat semakin tinggi maka mengindikasikan Jumlah Penduduk Miskin yang semakin menurun.
- d. Inflasi dengan nilai koefisiennya 0.011856 memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Yaitu apabila Inflasi naik sebesar satu persen maka Jumlah Penduduk Miskin akan naik sejumlah 0.011856. Sehingga Inflasi yang terusbertambah akan semakin meningkatkan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan dari hasil yang ditunjukkan pada tabel Fixed Effect Model dapat diinterpretasikan mengenai besarnya pengaruh dari variabel Rata-rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, dan Inflasi, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Koefisien Determinasi

Variabel	R square
RLS	0.999668
PnDRB	
PPP	
Inflasi	

Sumber: data diolah menggunakan e-views 9

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) dari model regresi adalah sebesar 0.999668 atau 99.96 %. Nilai koefisien determinasi sebesar 99.96 % artinya Rata-rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, dan Inflasi mampu menjelaskan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah sebesar 99.96 % dan sisanya sebesar 0.04 % dijelaskan oleh variabel (faktor) lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4.2.2. Hasil Uji F

Dalam uji F statistik menggunakan perbandingan antara probabilitas F dengan alpha lima persen. Sehingga dapat diketahui apakah variabel independen dalam model secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak.

Tabel 4.5

Hasil Uji F

Variabel	Probabilitas F
RLS	0.000000
PnDRB	
PPP	
Inflasi	

Sumber: data diolah menggunakan e-views 9

Pada tabel 4.5 diketahui nilai probabilitas F sebesar 0.000000 lebih kecil dari alpha lima persen ($0.000000 < 0.05$), maka dapat diartikan variabel independen Rata-rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli, dan Inflasi secara serentak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

4.3.2 Hasil Uji t

Seberapa jauh satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen dapat diketahui dengan melakukan uji t statistik, yaitu dengan melihat perbandingan dari probabilitas t dengan alpha lima persen. Sehingga dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis.

Tabel 4.6
Estimasi Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Prob	Keterangan
RLS	-1.737182	0.4005	Tidak Signifikan
PnDRB	-0.268158	0.0385	Signifikan
PPP	-0.008693	0.0000	Signifikan
Inflasi	0.011856	0.9730	Tidak Signifikan

Sumber: data diolah dengan menggunakan e-views 9

Berikut merupakan hasil uji t berdasarkan tabel *fixed effect model*, yaitu :

1. Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan tabel hasil perhitungan pada model *fixed effect*, variabel Rata-rata Lama Sekolah memiliki probabilitas sebesar 0.4005 lebih besar dari alpha lima persen ($0.4005 > 0.05$), dengan nilai koefisien -1.737182 maka dapat dinyatakan Rata-rata Lama Sekolah tidak signifikan negatif. Dengan demikian berarti variabel Rata-rata Lama Sekolah tidak mempengaruhi variabel Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. Sehingga tinggi

rendahnya Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

2. Pengaruh Pendapatan Perkapita

Menurut hasil regresi model *fixed effect* diketahui probabilitas Pendapatan Perkapita 0.0385 lebih besar dari alpha lima persen ($0.0385 > 0.05$) dan koefisiennya -0.268158. Hal ini berarti variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan negatif. Artinya pendapatan perkapita mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah.

3. Pengaruh Paritas Daya Beli

Berdasarkan tabel hasil uji t model *fixed effect* diketahui probabilitas Paritas Daya Beli 0.0000 lebih kecil dari alpha lima persen ($0.0000 < 0.05$) dengan koefisien -0.008693. Sehingga variabel Paritas Daya Beli berpengaruh signifikan negatif. Artinya daya beli masyarakat mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah.

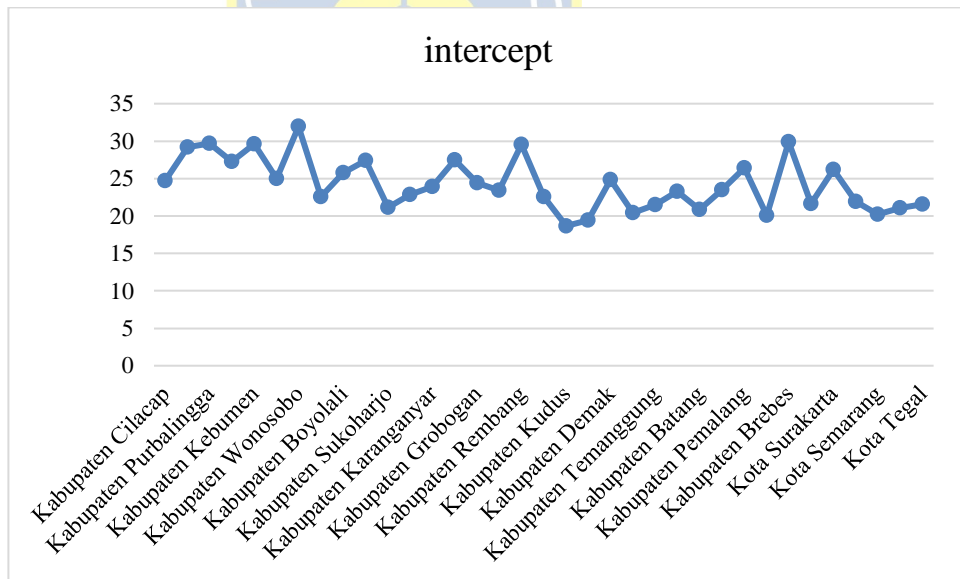
4. Pengaruh Inflasi

Probabilitas Inflasi berdasarkan hasil uji t model *fixed effect* yaitu 0.9730 lebih besar dari alpha lima persen ($0.9730 > 0.05$) dan koefisiennya 0.011856. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel Inflasi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. Sehingga Inflasi yang terjadi di Jawa Tengah tidak mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin.

4.5 Analisis Kabupaten/Kota

Analisis per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota, dimana hasil uji Fixed Effect setiap wilayah memiliki koefisien intersep berbeda-beda, hal itu menunjukkan bahwa model Fixed Effect mampu menjelaskan adanya perbedaan perilaku ke tiga puluh lima Kabupaten/Kota tersebut.

Gambar 4.1
Intercept Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Hasil pengolahan excel 2013

Dilihat dari hasil analisis wilayah yang telah dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diperoleh hasil tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan gambar 4.1, diketahui bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan daerah

dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan intersept 31,93879 dan Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dengan intersept sebesar 18,66929.

Struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Banyaknya industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten Kudus turut meningkatkan pendapatan daerah kudus, meningkatnya pendapatan daerah ini rupanya memiliki dampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Sedangkan Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terbesar di Jawa Tengah memiliki problem mendasar yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial, serta kesenjangan desa-kota. Kontibusi terbesar PDRB Wonosobo adalah sektor Pertanian, sektor pertanian ini mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Wonosobo, sehingga rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan sangat terkait dengan tingkat pendapatan dari sektor pertanian. Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha di sektor pertanian, lahan adalah faktor utama. Umumnya yang mendominasi pertanian adalah para petani gurem, yaitu petani dengan penguasaan lahan kurang dari 5.000 m². Penguasaan lahan yang sangat minim menimbulkan inefisiensi usaha. Biaya produksi dan hasil yang diterima tidak sebanding sehingga menimbulkan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP). Oleh karena itu, kemerosotan standar hidup ekonomi terjadi pada para petani

gurem tersebut sehingga umumnya merekalah masyarakat yang berada pada posisi berada/di bawah garis kemiskinan.

Perbedaan tingkat kemiskinan di tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini besar kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan, pendapatan perkapita, daya beli, dan inflasi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut.

4.6 Hasil Analisis

4.6.1 Rata-rata Lama Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Meningkatkan mutu pendidikan dengan beragam cara seperti pemerataan seta perluasan layanan pendidikan dasar, menengah, baik umum ataupun kejuruan dan juga memperluas layanan pendidikan tinggi adalah titik berat pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya pembangunan pendidikan di suatu wilayah, karena jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas dapat ditunjukkan dari rata-rata lama sekolahnya. Sehingga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Jadi jika kualitas rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat, akan berdampak juga terhadap peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini karena produktivitas atau peningkatan aktivitas dalam bekerja ataupun melaksanakan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesejahteraan. Taraf kesejahteraan yang meningkat akan mempengaruhi berkurangnya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Akan tetapi dalam penelitian ini rata-rata lama

sekolah tidak signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Dilihat dari probabilitasnya 0.4601 lebih besar dari alpha lima persen ($0.4601 > 0.05$), dengan koefisien -0.173317.

Ini artinya seberapa tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh penduduk usia 15 tahun keatas tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan karena berbeda rata-rata lama sekolah penduduknya di antara Kabupaten/Kota dan juga tidak diketahui apakah mereka akan berkontribusi terhadap perekonomian daerah tersebut atau tidak. Hal ini sesuai dengan penelitian Ernawati (2008) yang mengatakan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2010. Dengan tingkat signifikansinya $0,16 > 0.05$ dan koefisien regresinya 0.0005.

4.6.2 Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2006). Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara berkembang, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan, semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita, semakin

besar perbedaan antara kaum miskin dan kaya. Hal ini sesuai dengan hipotesis, oleh sebab itu pendapatan perkapita yang tinggi tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin suatu wilayah.

4.6.3 Paritas Daya Beli (Daya Beli) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Kemampuan seseorang untuk membelanjakan uangnya untuk barang-barang dan jasa disebut juga daya beli. Harga-harga riil antar wilayah sangat mempengaruhi kemampuan ini, sebab daya beli dapat naik atau turun berdasarkan nilai tukar yang digunakan. Maka dari itu tingkat daya beli masyarakat berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan daya beli masyarakat antar wilayah juga akan mempengaruhi gambaran kesejahteraan masyarakat antar daerah. Pendapatan perkapita riil yang disesuaikan mewakili komponen daya beli, pendapatan riil yang disesuaikan ini telah distandarkan dengan mendeflasikan melalui indeks harga konsumen. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daya beli berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah. Jika daya beli masyarakat tinggi maka tingkat kemiskinan akan turun, begitu juga sebaliknya.

Apabila dilihat dari hasil uji fixed effect, probabilitas PPP 0.0000 dengan koefisien -0.001049. Artinya PPP berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, ini sesuai dengan hipotesis. Sehingga apabila daya beli masyarakat di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tinggi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4.6.4 Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dan secara terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga barang dan jasa dapat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keadaan hidup masyarakat. Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sebab apabila pemerintah mengatasi inflasi, maka akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, kemudian jika pengangguran meningkat maka akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* diperoleh probabilitas inflasi 0.8592 lebih besar dari alpha 0.05, dan koefisiennya 0.007075. variabel inflasi tidak signifikan positif, yang mana tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017), dalam penelitiannya diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga sekalipun inflasi mengalami penurunan tidak membuat tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menurun juga.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan periode waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Menggunakan variabel independen Rata-rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita, Paritas Daya Beli (daya beli), dan Inflasi, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan dalam bab IV, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh tidak signifikan negatif, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis. Ini dikarenakan kualitas rata-rata lama sekolah di tiap daerah di Jawa Tengah berbeda-beda serta masih belum diketahui apakah tingkat rata-rata lama sekolah yang tinggi berperan terhadap perekonomian di Jawa Tengah atau tidak.
2. Variabel pendapatan perkapita memiliki hasil berpengaruh signifikan negatif. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis, karena dengan pendapatan perkapita yang tinggi mencerminkan jumlah penduduk miskin yang rendah.
3. Variabel paritas daya beli berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya dengan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi ternyata berdampak pada rendahnya jumlah penduduk miskin. Karena

daya beli yang tinggi menggambarkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

4. Variabel inflasi hasilnya berpengaruh tidak signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga naik turunnya inflasi tidak mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

5.2 Implikasi

Berdasarkan uraian pada analisis hasil dan simpulan, maka penulis mampu membuat implikasi dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Menurut teori lingkaran kemiskinan (cycle poverty), beberapa determinan kemiskinan antara lain rendahnya pendidikan, kualitas kesehatan yang buruk, banyaknya anak adalah investasi bagi orang miskin, serta rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya saving (karena pendapatan habis untuk konsumsi). Oleh karena itu pemerintah harusnya memaksimalkan berbagai fasilitas sosial yang menyangkut pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi para angkatan kerja yang sesuai dengan pendidikan yang telah ditamatkan.
2. Pendapatan perkapita menunjukkan hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan hipotesa bahwasannya semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang meningkat maka turut mengurangi jumlah penduduk miskin.

3. Paritas daya beli berpengaruh signifikan negatif. Hal ini sesuai dengan hipotesis, bahwa memang tingkat kemampuan seseorang untuk membelanjakan hartanya untuk barang dan jasa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Daerah dengan daya beli yang tinggi mengindikasikan Jumlah Penduduk Miskin yang rendah. Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan kebijakan-kebijakannya guna terus meningkatkan daya beli masyarakat di Jawa Tengah.
4. Pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yaitu tidak signifikan positif. Meskipun tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan namun pemerintah harus tetap mengontrol dan menjaga tingkat inflasi agar kenaikan harga barang-barang terutama barang kebutuhan pokok dan bangunan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudori, M. 2017. *Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. Jurnal Of Economics and Business, Vol 1. No 1. Hal 113-124.
- Anggadini, Fima. 2015. *Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013*. E-jurnal Katalogis, Vol 3. No 7. Hal 40-49.
- Badan Pusat Statistik. (2018, September 17). Retrieved From Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
- Imelia, 2012. *Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol 1. No 5. Hal 42-48.
- Kolibu, Meinny dkk. 2015. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap ingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*.
- Kumalasari, Merna. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*.
- Rusdarti & Karolina Sebayang, 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Economia, Vol 6. No 1. Hal 1-9.

- Setya Ningrum, Shinta. 2015. *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015*.
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. EKONISIA, Yogyakarta.
- Teddy, 2013. *Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku*. Jurnal Ekonomi, Vol VII. No 2. Hal 1-26.
- Todaro, Michael. P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2. Jakarta : Erlangga.
- Wahyu Yuliasih, Fitri. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Widajono, Agus. 2013. *Edisi Keempat Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.



LAMPIRAN I

Data Variabel Dependen dan Independen

Tahun	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Y	X1	X2	X3	X4
2015	Kabupaten Cilacap	243.50	6.58	58	9351	2.63
2016	Kabupaten Cilacap	240.20	6.90	58	9677	2.77
2017	Kabupaten Cilacap	238.30	6.91	62	9896	4.41
2015	Kabupaten Banyumas	285.90	7.31	24	10104	2.52
2016	Kabupaten Banyumas	283.90	7.39	25	10554	2.42
2017	Kabupaten Banyumas	283.20	7.40	27	10713	3.91
2015	Kabupaten Purbalingga	176.50	6.85	21	8938	1.62
2016	Kabupaten Purbalingga	171.80	6.86	22	9159	2.39
2017	Kabupaten Purbalingga	171.90	6.87	23	9340	3.72
2015	Kabupaten Banjarnegara	165.40	6.17	18	7930	2.97
2016	Kabupaten Banjarnegara	158.20	6.26	19	8400	2.87
2017	Kabupaten Banjarnegara	156.80	6.27	21	8630	3.67
2015	Kabupaten Kebumen	241.90	7.04	18	8008	2.91
2016	Kabupaten Kebumen	235.90	7.05	19	8276	2.71
2017	Kabupaten Kebumen	233.40	7.29	20	8446	3.25
2015	Kabupaten Purworejo	101.20	7.65	20	9305	3.45
2016	Kabupaten Purworejo	99.10	7.66	21	9497	2.66
2017	Kabupaten Purworejo	98.60	7.69	23	9601	4.29
2015	Kabupaten Wonosobo	166.40	6.11	18	9736	2.71
2016	Kabupaten Wonosobo	160.10	6.12	20	9877	2.97

2017	Kabupaten Wonosobo	159.20	6.51	21	9969	3.21
2015	Kabupaten Magelang	162.40	7.19	19	8182	3.60
2016	Kabupaten Magelang	158.90	7.40	21	8501	2.86
2017	Kabupaten Magelang	157.20	7.41	22	8627	3.47
2015	Kabupaten Boyolali	120	7.10	24	11806	2.58
2016	Kabupaten Boyolali	117	7.17	27	12192	2.65
2017	Kabupaten Boyolali	116.40	7.44	29	12262	3.08
2015	Kabupaten Klaten	172.30	8.16	25	11178	2.57
2016	Kabupaten Klaten	168	8.22	27	11227	2.31
2017	Kabupaten Klaten	165	8.23	29	11369	3.12
2015	Kabupaten Sukoharjo	79.90	8.50	31	10416	2.69
2016	Kabupaten Sukoharjo	78.90	8.58	33	10452	2.34
2017	Kabupaten Sukoharjo	76.70	8.71	36	10765	3.40
2015	Kabupaten Wonogiri	123	6.39	23	8417	2.13
2016	Kabupaten Wonogiri	124.80	6.57	24	8589	2.94
2017	Kabupaten Wonogiri	123	6.68	26	8765	2.32
2015	Kabupaten Karanganyar	106.40	8.48	31	10486	2.40
2016	Kabupaten Karanganyar	107.70	8.49	34	10722	1.93
2017	Kabupaten Karanganyar	106.80	8.50	36	10933	3.15
2015	Kabupaten Sragen	130.40	6.86	31	11434	3.05
2016	Kabupaten Sragen	126.80	6.87	34	11688	2.49
2017	Kabupaten Sragen	124	7.04	36	12041	3.18
2015	Kabupaten Grobogan	184.50	6.33	15	9457	3.31

2016	Kabupaten Grobogan	184.10	6.62	16	9487	2.41
2017	Kabupaten Grobogan	181	6.66	17	9716	4.05
2015	Kabupaten Blora	115	6.04	19	8699	2.85
2016	Kabupaten Blora	113.90	6.18	23	8846	2.14
2017	Kabupaten Blora	111.90	6.45	25	9065	2.98
2015	Kabupaten Rembang	119.10	6.92	22	9122	2.66
2016	Kabupaten Rembang	115.50	6.93	24	9453	1.75
2017	Kabupaten Rembang	115.20	6.94	26	9736	3.31
2015	Kabupaten Pati	147.10	6.71	25	9380	3.23
2016	Kabupaten Pati	144.20	6.83	27	9548	2.31
2017	Kabupaten Pati	141.70	7.08	29	9813	3.51
2015	Kabupaten Kudus	64.10	7.84	101	10203	3.28
2016	Kabupaten Kudus	64.20	7.85	107	10348	2.32
2017	Kabupaten Kudus	64.40	8.31	115	10639	4.17
2015	Kabupaten Jepara	100.60	7.31	19	9504	4.57
2016	Kabupaten Jepara	100.30	7.32	20	9695	3.45
2017	Kabupaten Jepara	99	7.33	21	9745	2.83
2015	Kabupaten Demak	160.90	7.45	17	9118	2.80
2016	Kabupaten Demak	158.80	7.46	18	9377	2.27
2017	Kabupaten Demak	152.60	7.47	20	9544	3.57
2015	Kabupaten Semarang	81.20	7.33	36	10778	2.85
2016	Kabupaten Semarang	80.70	7.48	39	11102	2.39
2017	Kabupaten Semarang	79.70	7.87	42	11389	3.67

2015	Kabupaten Temanggung	87.50	6.52	22	8369	2.74
2016	Kabupaten Temanggung	87.10	6.55	23	8593	2.42
2017	Kabupaten Temanggung	86.80	6.90	25	8794	3.12
2015	Kabupaten Kendal	109.30	6.64	33	10419	4.13
2016	Kabupaten Kendal	107.80	6.65	36	10631	2.47
2017	Kabupaten Kendal	106.10	6.85	38	10863	3.60
2015	Kabupaten Batang	83.50	6.41	21	8244	2.94
2016	Kabupaten Batang	82.60	6.42	23	8568	2.24
2017	Kabupaten Batang	81.50	6.61	25	8805	3.44
2015	Kabupaten Pekalongan	112.10	6.55	19	9208	3.42
2016	Kabupaten Pekalongan	113.30	6.56	21	9300	2.96
2017	Kabupaten Pekalongan	111.60	6.73	22	9702	4.01
2015	Kabupaten Pemasang	235.50	6.04	14	7177	3.52
2016	Kabupaten Pemasang	227.10	6.05	16	7447	2.33
2017	Kabupaten Pemasang	225	6.31	17	7785	3.64
2015	Kabupaten Tegal	143.50	6.30	18	8367	3.64
2016	Kabupaten Tegal	144.20	6.54	20	8709	2.67
2017	Kabupaten Tegal	141.80	6.55	21	9136	3.58
2015	Kabupaten Brebes	352	5.88	19	8898	3.08
2016	Kabupaten Brebes	348	6.17	21	9148	2.84
2017	Kabupaten Brebes	343.50	6.18	22	9554	4.24
2015	Kota Magelang	10.90	10.28	54	10793	2.70
2016	Kota Magelang	10.60	10.29	58	11090	2.25

2017	Kota Magelang	10.60	10.30	63	11525	3.90
2015	Kota Surakarta	55.70	10.36	68	13604	2.56
2016	Kota Surakarta	55.90	10.37	73	13900	2.15
2017	Kota Surakarta	54.90	10.38	80	13986	3.10
2015	Kota Salatiga	10.60	9.81	53	14600	2.61
2016	Kota Salatiga	9.70	9.82	57	14811	2.19
2017	Kota Salatiga	9.60	10.15	61	14921	3.50
2015	Kota Semarang	84.30	10.20	79	13589	2.56
2016	Kota Semarang	83.60	10.49	85	13909	2.32
2017	Kota Semarang	80.90	10.50	92	14334	3.64
2015	Kota Pekalongan	24.10	8.28	26	11253	3.46
2016	Kota Pekalongan	23.60	8.29	28	11721	2.94
2017	Kota Pekalongan	22.50	8.56	31	11800	3.61
2015	Kota Tegal	20.30	8.27	45	11748	3.95
2016	Kota Tegal	20.30	8.28	48	11849	2.71
2017	Kota Tegal	20.10	8.29	52	12283	4.03

Keterangan:

- Y : Jumlah Penduduk Miskin
X1 : Rata-rata Lama Sekolah
X2 : Pendapatan Perkapita
X3 : Paritas Daya Beli
X4 : Inflasi

LAMPIRAN II

Common Effect Test

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/24/19 Time: 13:14
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	398.5449	56.41497	7.064523	0.0000
X1	-28.47222	8.931041	-3.188007	0.0019
X2	-0.121841	0.397073	-0.306849	0.7596
X3	-0.005193	0.006101	-0.851245	0.3967
X4	-0.047819	9.662590	-0.004949	0.9961
R-squared	0.351601	Mean dependent var		128.9019
Adjusted R-squared	0.325665	S.D. dependent var		74.45573
S.E. of regression	61.14148	Akaike info criterion		11.11071
Sum squared resid	373828.0	Schwarz criterion		11.23708
Log likelihood	-578.3121	Hannan-Quinn criter.		11.16192
F-statistic	13.55652	Durbin-Watson stat		0.007358
Prob(F-statistic)	0.000000			

الجامعة الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY
OF MAHARAJA

LAMPIRAN III

Fixed Effect Test

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/24/19 Time: 13:15
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	221.3465	14.53977	15.22352	0.0000
X1	-1.737182	2.052943	-0.846191	0.4005
X2	0.268158	0.126963	2.112090	0.0385
X3	-0.008693	0.001491	-5.828374	0.0000
X4	0.011856	0.349586	0.033913	0.9730

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999668	Mean dependent var	128.9019
Adjusted R-squared	0.999478	S.D. dependent var	74.45573
S.E. of regression	1.701809	Akaike info criterion	4.179813
Sum squared resid	191.1462	Schwarz criterion	5.165569
Log likelihood	-180.4402	Hannan-Quinn criter.	4.579261
F-statistic	5236.971	Durbin-Watson stat	2.147567
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN IV

Random Effect Test

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/24/19 Time: 13:27
 Sample: 2015 2017
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	226.3333	17.96398	12.59928	0.0000
X1	-2.517328	2.031386	-1.239217	0.2182
X2	0.257355	0.124895	2.060563	0.0419
X3	-0.008595	0.001473	-5.835673	0.0000
X4	0.081607	0.348697	0.234035	0.8154
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			64.27888	0.9993
Idiosyncratic random			1.701809	0.0007
Weighted Statistics				
R-squared	0.448399	Mean dependent var		1.970110
Adjusted R-squared	0.426335	S.D. dependent var		2.309356
S.E. of regression	1.749122	Sum squared resid		305.9427
F-statistic	20.32263	Durbin-Watson stat		1.356888
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.153242	Mean dependent var		128.9019
Sum squared resid	488190.1	Durbin-Watson stat		0.000850

LAMPIRAN V

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3794.451262	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	795.743793	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/24/19 Time: 13:22

Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	398.5449	56.41497	7.064523	0.0000
X1	-28.47222	8.931041	-3.188007	0.0019
X2	-0.121841	0.397073	-0.306849	0.7596
X3	-0.005193	0.006101	-0.851245	0.3967
X4	-0.047819	9.662590	-0.004949	0.9961
R-squared	0.351601	Mean dependent var		128.9019
Adjusted R-squared	0.325665	S.D. dependent var		74.45573
S.E. of regression	61.14148	Akaike info criterion		11.11071
Sum squared resid	373828.0	Schwarz criterion		11.23708
Log likelihood	-578.3121	Hannan-Quinn criter.		11.16192
F-statistic	13.55652	Durbin-Watson stat		0.007358
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN VI

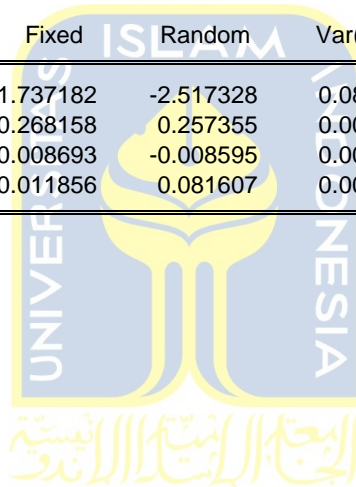
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.637548	4	0.0470

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-1.737182	-2.517328	0.088047	0.0086
X2	0.268158	0.257355	0.000521	0.6359
X3	-0.008693	-0.008595	0.000000	0.6784
X4	0.011856	0.081607	0.000621	0.0051



LAMPIRAN VII

Konstanta

Kabupaten/Kota	Koefisien C	Koefisien per Kabupaten/Kota	Konstanta
Kabupaten Cilacap	24.30596	0.418072	24.724.032
Kabupaten Banyumas	24.30596	4.886408	29.192.368
Kabupaten Purbalingga	24.30596	5.358368	29.664.328
Kabupaten Banjarnegara	24.30596	2.930838	27.236.798
Kabupaten Kebumen	24.30596	5.297333	29.603.293
Kabupaten Purworejo	24.30596	0.673924	24.979.884
Kabupaten Wonosobo	24.30596	7.632825	31.938.785
Kabupaten Magelang	24.30596	-1,732681	22.573.279
Kabupaten Boyolali	24.30596	1.458388	25.764.348
Kabupaten Klaten	24.30596	3.087240	273.932
Kabupaten Sukoharjo	24.30596	-3,140879	21.165.081
Kabupaten Wonogiri	24.30596	-1,464548	22.841.412
Kabupaten Karanganyar	24.30596	0.399882	23.906.078
Kabupaten Sragen	24.30596	3.191639	27.497.599
Kabupaten Grobogan	24.30596	0.141404	24.447.364
Kabupaten Blora	24.30596	-0.908795	23.397.165
Kabupaten Rembang	24.30596	5.216070	2.952.203
Kabupaten Pati	24.30596	-1,744819	22.561.141

Kabupaten Kudus	24.30596	-5,636671	18.669.289
Kabupaten Jepara	24.30596	-4,855966	19.449.994
Kabupaten Demak	24.30596	0.536587	24.842.547
Kabupaten Semarang	24.30596	-3,869117	20.436.843
Kabupaten Temanggung	24.30596	-2,83453	2.147.143
Kabupaten Kendal	24.30596	-1,064071	23.241.889
Kabupaten Batang	24.30596	-3,480656	20.825.304
Kabupaten Pekalongan	24.30596	-0,781649	23.524.311
Kabupaten Pemalang	24.30596	2.134598	26.440.558
Kabupaten Tegal	24.30596	-4,246488	20.059.472
Kabupaten Brebes	24.30596	5.596014	2.991.974
Kota Magelang	24.30596	-2,682057	21.623.903
Kota Surakarta	24.30596	1,92401	2.622.997
Kota Salatiga	24.30596	-2,403541	21.902.419
Kota Semarang	24.30596	-4,082511	20.223.449
Kota Pekalongan	24.30596	-3,226789	21.079.171
Kota Tegal	24.30596	-2,727829	21.578.131